



# **LKIP**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PERTANIAN**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PERTANIAN Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP DINAS PERTANIAN Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

LubukPakam, Februari 2024

DINAS PERTANIAN

Kab.Deli Serdang



**RAHMAN SALEH DONGORAN,SP,M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680414 199103 1 016**

## DAFTAR ISI

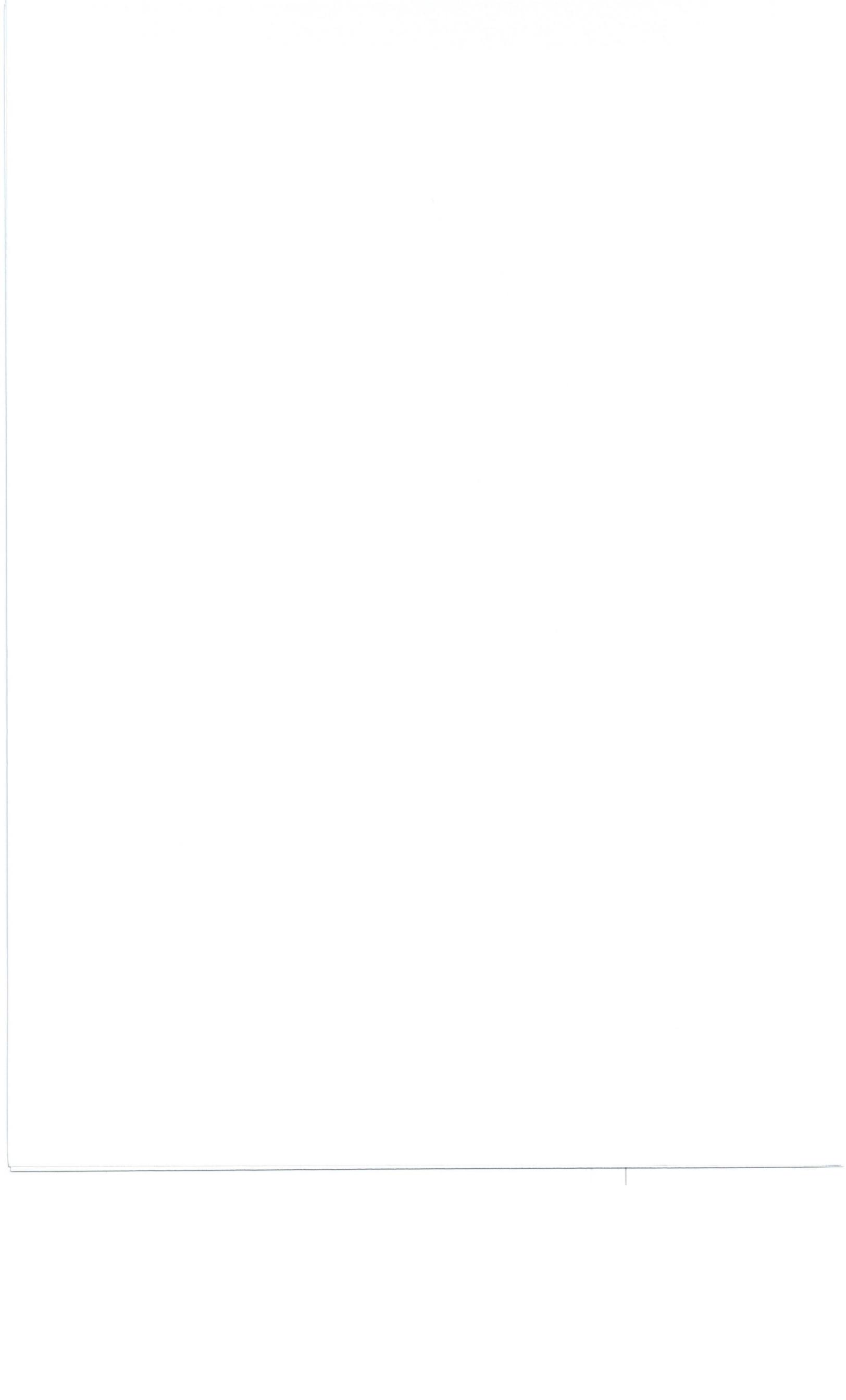
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
1.3.1 Isu Strategi Kabupaten .....	4
1.3.2 Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang .....	6
1.4 Dasar Hukum.....	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n .....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	10
<b>BAB III</b> .....	<b>18</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	18
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	18
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan .....	19
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	20
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengantarget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	21
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) .....	22
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	22
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	23
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	25
3.2 Realisasi Anggaran .....	37
<b>BAB IV</b> .....	<b>41</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n .....	4
<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis .....	8
<b>Tabel 2.2</b>	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n .....	9
<b>Tabel 2.3</b>	Rencana Kinerja Tahun n .....	10
<b>Tabel 2.4</b>	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah .....	11
<b>Tabel 2.5</b>	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n ...	12
<b>Tabel 3.1</b>	Pengkategorian Capaian Kinerja .....	19
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n .....	19
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Capaian Kinerja .....	20
<b>Tabel 3.4</b>	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	21
<b>Tabel 3.5</b>	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota .....	22
<b>Tabel 3.6</b>	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	22
<b>Tabel 3.7</b>	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	23
<b>Tabel 3.8</b>	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....	25
<b>Tabel 3.9</b>	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	38

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** Struktur Organisasi..... 3



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut di dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS PERTANIAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP DINAS PERTANIAN Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja ujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## 1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS PERTANIAN :

### 1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DINAS PERTANIAN mempunyai tugas:

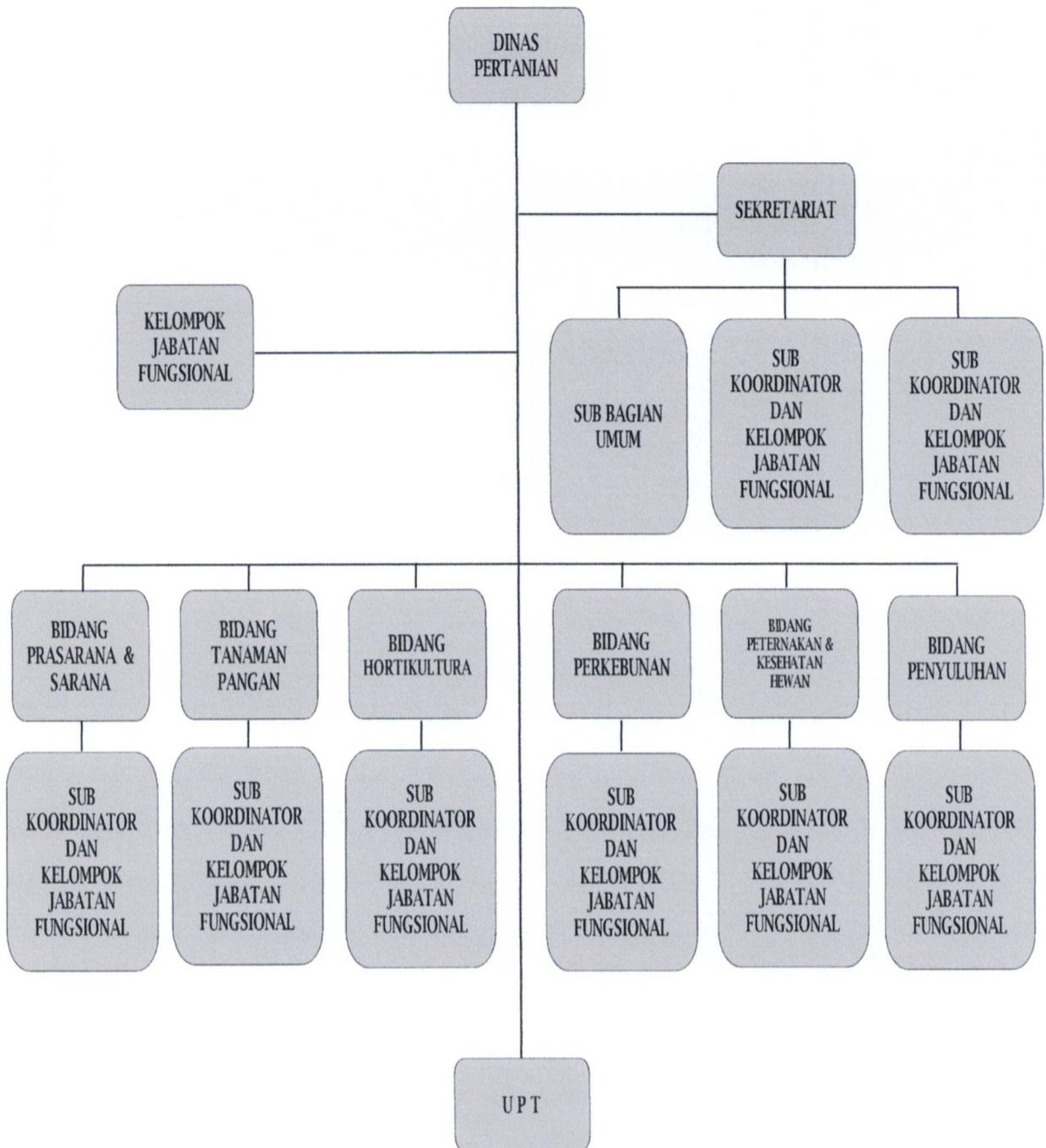
- ✦ Membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PERTANIAN mempunyai fungsi :

- ✦ Perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- ✦ Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- ✦ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- ✦ Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- ✦ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja DINAS PERTANIAN. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PERTANIAN.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS PERTANIAN



### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PERTANIAN. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PERTANIAN:

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Sumber	Tahun	Jumlah
-1	-2	-3
APBD	2023	Rp41.583.165.689
APBD	2024	Rp53.344.551.244
SumberLainnya (Jika Ada)	-	Rp -

Sumber : DPAP-SKPD Dinas Pertanian Kab.Deli Serdang Tahun 2023 dan 2024

### 1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi netitas (daerah/masyarakat) di masa dating. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

#### 1.3.1 Isu Strategis Kabupaten

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan analisis serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

## **1. Penanggulangan kemiskinan**

Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang mempunyai 4 (empat) dimensi pokok yaitu : (1) minimnya kesempatan, (2) rendahnya kemampuan, (3) terbatasnya jaminan, (4) pemberdayaan yang kurang.

## **2. Pendidikan**

Dalam Pendidikan, Kabupaten Deli Serdang perlu untuk melakukan peningkatan karena angka capaian masih melakukan peningkatan karena angka capaian masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan berada dalam posisi ke-12 dari 78 kabupaten/kota.

## **3. Kesehatan**

Faktor kesehatan masyarakat merupakan factor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumberdaya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu daerah.

## **4. Infrastruktur**

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah.

## **5. Kependudukan**

Salah satu tantangan dalam hal kependudukan adalah pemenuhan pangan mengingat kecenderungan penurunan produksi pertanian serta minimnya stimulus disektor pertanian menjadi ketahanan pangan menjadihal yang krusial.

## **6. Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan limbah padat/sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Selain isu persampahan, isu mengenai persediaan air juga penting untuk diperhatikan, mengingat pemanasan global telah menciptakan efek perubahan iklim, salah satunya adalah air.

## **7. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan pembaharuan dan perubahan secara mendasar dari system penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

### 1.3.2 Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian adalah :

1. Terjadinya alih fungsi lahan akibat pembangunan sektor non pertanian
2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, bibit, pupuk dan alsintan)
3. Kelembagaan petani yang masih lemah yang disebabkan masih relative rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan berkurangnya minat bekerja di sector pertanian.
4. Keterbatasan informasi pasar dan jaringan distribusi yang tidak memadai yang menyebabkan lemahnya posisi tawar petani.

### 1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS PERTANIAN ini disusun berdasarkan beberapa dasar hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

## 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten DINAS PERTANIAN Tahun 2024 adalah:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV          PENUTUP**

Bab ini mengurai kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS PERTANIAN adalah

- ✦ Meningkatkan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB
- ✦ Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS PERTANIAN:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	578.696	771.398	804,073
		1.2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	327.875	325.975	333,790
2	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP	78	80	82
		2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	83,6	84

Sumber :RenstraDINAS PERTANIANPeriode 2022 – 2024

Ada pun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PERTANIAN adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya produksi pertanian dan populasi ternak dengan penerapan teknologi budidaya	1.1	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	Jumlah produksi secara keseluruhan selama 1 tahun dari 7 komoditi pertanian yang menjadi IKU Dinas Pertanian, dimana komoditi tersebut adalah padi, ubi kayu, cabai merah, bawang merah, pisang barangan, salak dan kakao	Menghitung jumlah total produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dari 22 kecamatan	Bidang Hortikultura Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Perkebunan
		1.2	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	Jumlah populasi ternak secara keseluruhan selama 1 tahun dari 4 jenis ternak yang menjadi IKU Dinas Pertanian, dimana jenis ternak tersebut adalah sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba.	Menghitung jumlah total populasi ternak ((sapi, kerbau, kambing, domba) dari 22 kecamatan yang ada di Kab. Deli Serdang	Bidang Peternakan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	2.1	Nilai LHE-AKIP	Poin	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	Dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Sub Bagian Program
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	Menghitung jumlah total dari nilai persepsi per unsure dibagi dengan total unsur yang terisi lalu dikalikan  Dengan nilai penimbang	Sub Bagian Umum

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PERTANIAN Tahun 2024

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERTANIAN Tahun 2024 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 DINAS PERTANIAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	
1	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	1.1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	578.696
		1.1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	327.875
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP	Poin	78
		2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	81

Sumber :IKU DINAS PERTANIAN tahun 2024

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan

oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PERTANIAN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PERTANIAN Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya produksi pertanian dan populasi ternak dengan penerapan teknologi budidaya	Jumlah Produksi Pertanian	578.696
		Jumlah Populasi Ternak	327.875
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE-AKIP	78
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERTANIAN Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PERTANIAN :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS PERTANIAN  
Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
	<b>PROGRAM</b>		
1	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	578.696 ton
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	578.696 ton
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Jumlah Populasi Ternak	327.875 ekor
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	578.696 ton
5	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	578.696 ton
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai LHE-AKIP	78
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81

*Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERTANIAN Tahun 2024*

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	<b>KEGIATAN</b>		
1	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Jumlah penggunaan dan pengawasan sarana pertanian	12 laporan
2	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan SDG Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4 Laporan
3	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak	4 Laporan
4	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	4 Laporan
5	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Yang terlaksana	4 Laporan
6	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	2 Laporan
7	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan	4 Laporan
8	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan
9	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4 Laporan
10	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Laporan Penyuluhan Pertanian Yang terlaksana	4 Laporan

11	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100%
12	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%
13	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%
14	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100%
15	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan penunjang layanan kedinasan	100%
16	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase sarpras dan bangunan yang terpelihara fungsinya	90%

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERTANIAN Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan
3	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB
4	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	172 Dokumen
5	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen
6	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan
7	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Ton

8	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Jumlah Kawasan Lahan Pertanian yang Termanfaatkan	
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	2 Laporan
10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit
11	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit
12	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	22 Laporan
13	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan dan / atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah Pengawasan Penerapan persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	1 Laporan
14	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	22 laporan
15	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000 Ha
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Unit
17	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	123 unit
18	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	14 unit
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen

20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
22	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3380 org/bln
26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen
27	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan
30	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket

31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
33	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
34	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
38	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERTANIAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERTANIAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS PERTANIAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### *3.1.1 Skala Capaian Kinerja*

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PERTANIAN tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Produksi Pertanian	578,696	624,319	107.88%	Sangat Tinggi	Bidang Hortikultura, Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Perkebunan
		Jumlah Populasi Ternak	327,875	268,720	81.96%	Tinggi	Bidang Peternakan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP	78	64.68	82.92%	Tinggi	Sub Bagian Program
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	94.25	116.36%	Sangat Tinggi	Sub Bagian Umum

Sumber :IKU DinasPertanianKab. Deli SerdangTahun 2024

Dari table 3.2 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang memiliki 2 (dua) sasaran kinerja, sasaran kinerja yang pertama yaitu Meningkatkan Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya dan sasaran kinerja yang kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang pertama diukur dengan 2 (dua) indicator kinerja yaitu Jumlah Produksi Pertanian dan Jumlah Populasi Ternak. Indikator ini merupakan indicator yang akan mengukur besaran kontribusi sector pertanian terhadap PDRB setiap tahun.

Sasaran yang kedua diukur dengan 2 (dua) indicator kinerja yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator ini dicantumkan mengingat bahwa banyak kegiatan Dinas ertanian yang berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok tani, maka perlu di ukur kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.

Yang kedua adalah indikator Nilai LHE-AKIP (Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah. Indikator ini perlu dicantumkan sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian atas mandate yang dipegangnya. Penilaian ini meliputi aspek perencanaan, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan aspek capaian kinerja.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada table berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Targe t	Realisa si	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Produksi Pertanian	574.08	577.312	693.383	578.696	624,319	107.88%
		Jumlah Populasi Ternak	370.27	382.972	345.125	327.875	268,720	81.96%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat	Nilai LHE-AKIP	75	77	77	78	64.68	82.92%

Daerah	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	81	83	83	81	94.25	116.36%
--------	---------------------------------	----	----	----	----	-------	---------

Sumber :IKU Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Tahun 2024

Dari table 3.3 dapat dilihat untuk angka realisasi jumlah produksi pertanian mengalami penurunan dari mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian realisasi terakhir tahun 2024 sebesar 107,88 %. Untuk angka realisasi jumlah populasi ternak juga mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar tiap tahun dengan capaian realisasi terakhir tahun 2024 sebesar 81,96 %. Untuk realisasi nilai LHE-AKIP Dinas Pertanian mengalami Penurunan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 64,68 %. Dan untuk realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 capaian realisasi pada sebesar 94,25 %.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

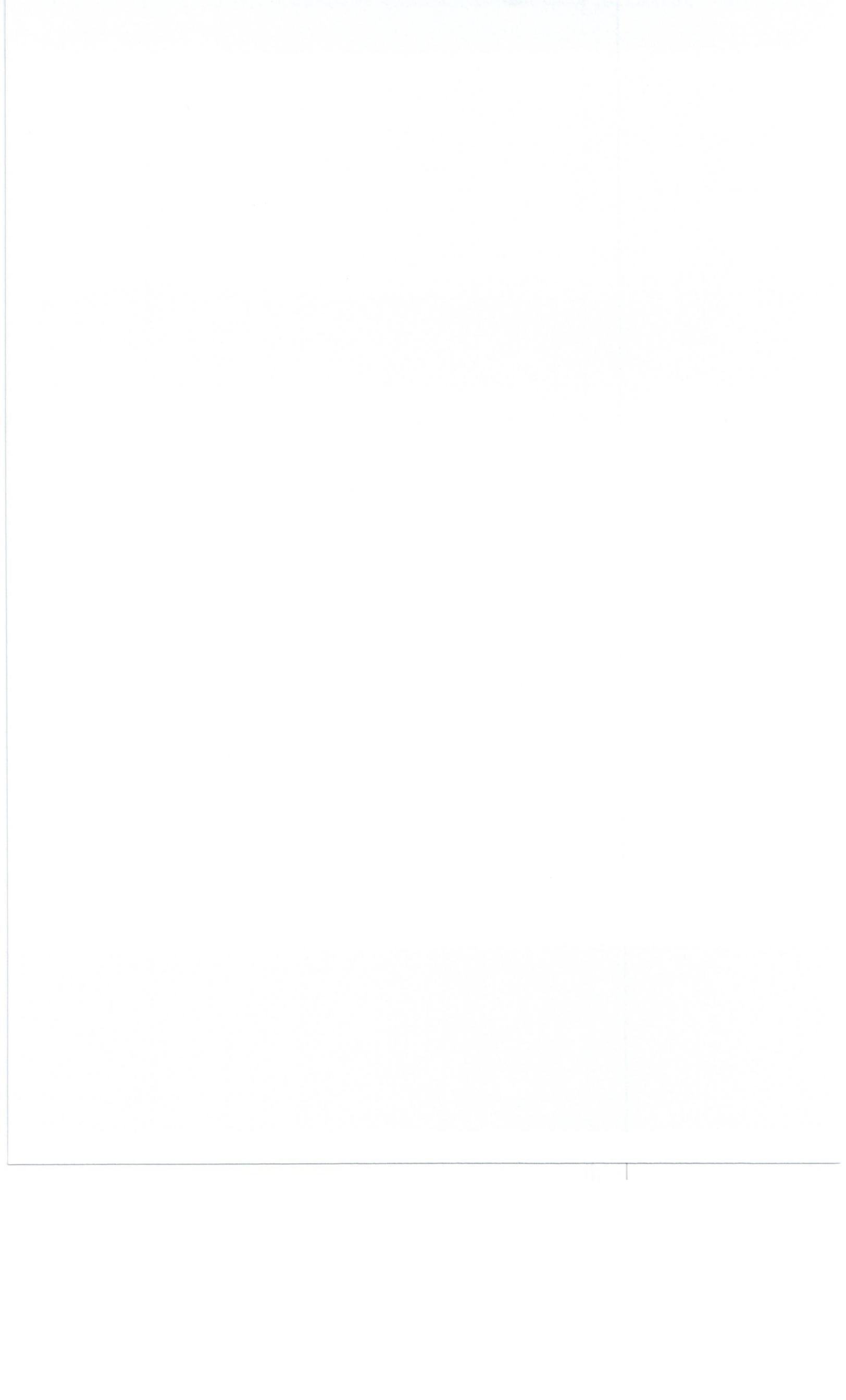
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERTANIAN periode 2024 - 2025 diuraikan sebagai berikut

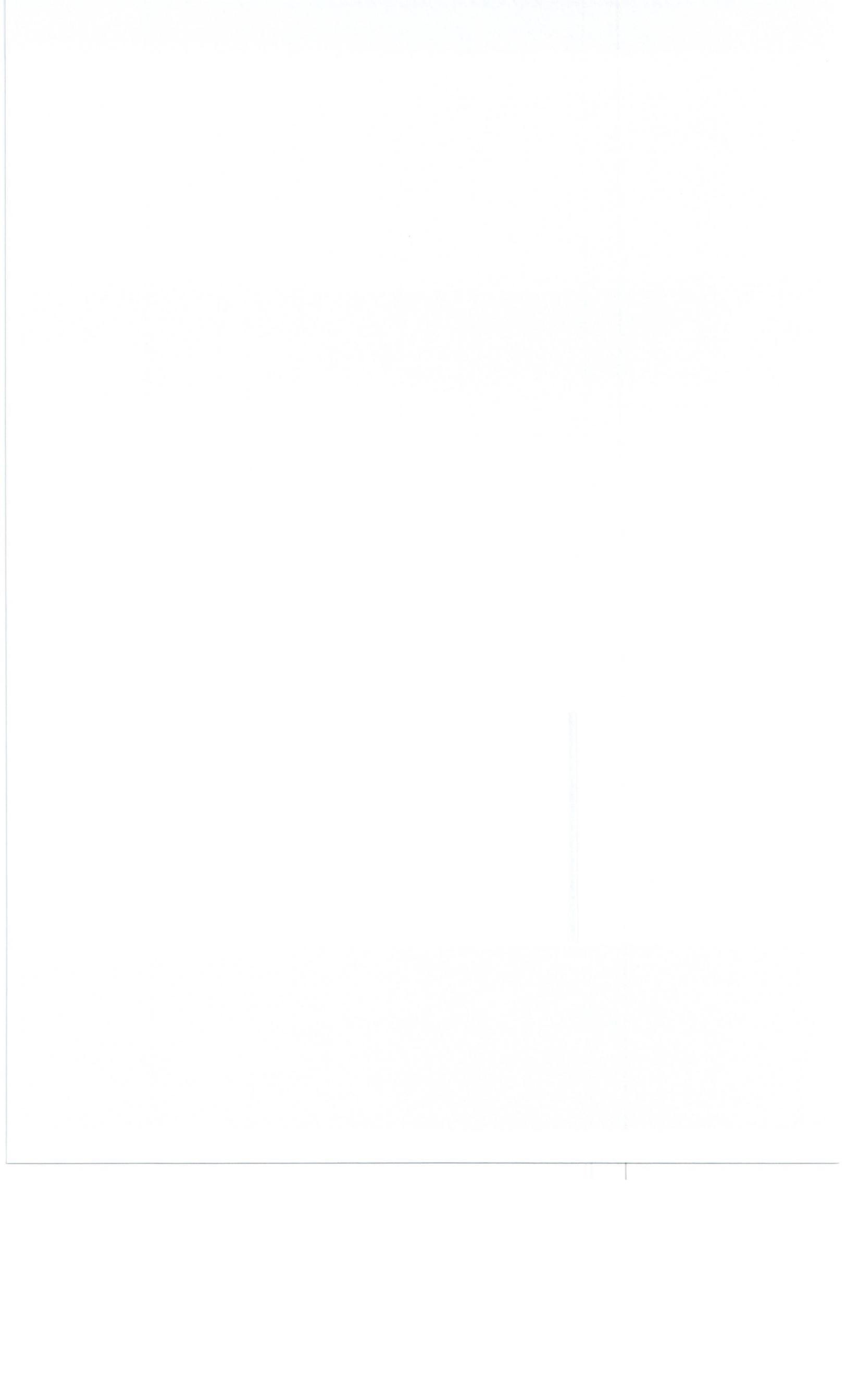
**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Produksi Pertanian	624,319	578,696	107.88
		Jumlah Populasi Ternak	268,720	327,875	81.96
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP	64.68	78	82.92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.25	81	116.36

Sumber :IKU Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang

Dari table 3.4 dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang ada di Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang bahwa ada 2 indikator yang sudah melampaui target akhir perubahan rencana





strategis (renstra) dinas pertanian yaitu jumlah produksi Pertanian dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2 indikator yaitu Nilai LHE-AKIP dan Jumlah Populasi Ternak yang belum mencapai target. Dengan mengukur capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir renstra, maka dapat diketahui kondisi yang mempengaruhi besar kecilnya capaian, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk perencanaan berikutnya. Perencanaan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana anggaran

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standard nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Produksi Pertanian	693.383	-	107.88
		Jumlah Populasi Ternak	345	-	81.96
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP	77	-	82.92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	-	116.36

Sumber :IKU DinasPertanianKab. Deli Serdang

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta indicator solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta indicator dan solusi yang telah dilakukan disajikan pada table berikut :

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan	Jumlah Produksi Pertanian	578,696	624,319	107.88	Berhasil mencapai target	-

	Populasi Ternak Dengan Penerapan Teknologi Budi Daya	Jumlah Populasi Ternak	327,875	268,720	81.96	Tidak Berhasil mencapai target	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP	78	64.68	82.92	tidak tercapai target	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	94.25	116.36	Berhasil mencapai target	-

Sumber :IKU Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang 2024

Dari table 3.6 di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang ada di Dinas Pertanian tidak terlaksana dengan baik, ini terlihat dari realisasi yang tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Di atas juga dapat terlihat bahwa persentase realisasi tertinggi ada pada indikator kinerja :jumlah produksi pertanian sebesar 107,88%.

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada table berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran Tahun 2024			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Jumlah Produksi Pertanian	578,696	624,319	107.88%	15.402.692.201	3,662,306,255	23.78%	40%
2	Jumlah Populasi Ternak	327,875	268,720	81.96%	1,993,785,201	673,910,168	33.80%	26%
3	Nilai LHE-AKIP	78	64.68	82.92%	31.650.695.692	22,628,028,881	71.49%	28%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	94,25	116,36%	4,297,378,150	3,088,507,528	71.87%	18%

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023 Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang

Cara menghitung efisiensi =  $E = \sum \frac{(1 - \text{RAK ke } i / \text{RVK ke } i) \times 100\%}{\text{PAK ke } i / \text{TVK ke } i}$

PAK ke I / TVK ke i n

Efisiensi jumlah produksi pertanian

$$= \sum \frac{(1 - 3.662.306.255/624.319) \times 100\%}{15.402.692.201/578.696}$$

$$= (1 - 2,03) \times 100 \%$$

$$= 1,2 \times 100 \% = 120\%$$

Efisiensi jumlah populasi ternak

$$= \sum \frac{(1 - 673.910.168/268.720) \times 100\%}{1.993.785.201/327.875}$$

$$= (1 - 0,41) \times 100\%$$

$$= 0,58 \times 100\% = 58,76 \%$$

Efisiensi Nilai LHE-AKIP

$$= \sum \frac{(1 - 22.628.028.881/64,68) \times 100\%}{31.650.695.692/78}$$

$$= 1 - 0,86 \times 100\%$$

$$= 0,14 \times 100\% = 14\%$$

Efisiensi Nilai IKM

$$= \sum \frac{(1 - 3.088.507.528/94,25) \times 100\%}{4.297.378.150/81}$$

$$= 1 - 0,61 \times 100\%$$

$$= 0,39 \times 100\% = 39\%$$

Efisiensi total

$$= \sum \frac{(120\% + 58,76\% + 14\% + 39\%)}{4}$$

$$= \sum \frac{(231,74\%)}{4} = 57,94 \%$$

Dari tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa persentase capaian indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan untuk persentase capaian anggaran tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan atau efisiensi anggaran kegiatan sebesar 57,94 %.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan table dibawah ini

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	13		
				<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>		10		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi	69	Menunjang	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0,2	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%

				<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) HewanTumbuha n, dan MikroOrganism e Kewenangan Kabupaten/Kota Yang terlaksana	8		
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kualiatas SDG Hewan/tanaman	4	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	36	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	30	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%

			<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana	27	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	27	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Kabupaten/Kota Yang terlaksana	45		
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	45	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%

2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				
			<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Yang terlaksana	43	-	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Jumlah kawasan lahan pertanian yang termanfaatkan	43	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Yang terlaksana	93		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	93	Menunjang	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	91	Menunjang	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	91	Menunjang	

3				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Jumlah Populasi Ternak	16		
				<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana	4		
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana	14		
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan dan / atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	14	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di

								bawah 50%
				<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana	30		
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	30	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
4				<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	0		
				<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0		
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan	0	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran

					Perkebunan yang Dikendalikan			an dan capaian di bawah 50%
5				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Pertanian	40		
				<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Sub Kegiatan Penyuluhan Pertanian Yang terlaksana	40		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59	Menunjang	

6				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai LHE-AKIP	72		
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	48	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74	Menunjang	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	Menunjang	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	71		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	Menunjang	

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83	Menunjang	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99	Menunjang	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	99	Menunjang	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	0	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%

			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	35	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70	Menunjang	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	21	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran dan capaian di bawah 50%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	Tidak Menunjang	Karena adanya perubahan dan efisiensi anggaran

							an dan capaian di bawah 50%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	20	Tidak Menunjang	Karena adanya peruba han dan efisien si anggar an dan capaian di bawah 50%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Tidak Menunjang	Karena adanya peruba han dan efisien si anggar an dan capaian di bawah 50%
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemuhan penunjang layanan kedinasan</b>	<b>90</b>		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	91	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	Menunjang	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	91	Menunjang
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarpras dan bangunan yang terpelihara fungsinya</b>	<b>93</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	97	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86	Menunjang

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Pertanian Kab.Deli Serdang Tahun 2024

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa semua program/kegiatan yang ada bersifat menunjang kinerja Dinas Pertanian namun sebahagian besar capaiannya tidak mendukung. Dari hasil capaian dapat dilihat ada program kegiatan yang capaiannya di bawah 50 %. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran di Dinas Pertanian.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11,479,836,945	1,456,552,007	13%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,948,073,842	25,716,536,409	72%
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2,553,493,644	1,957,676,700	77%
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	728,119,733	113,755,668	16%
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	608,300,295	0	0%
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,026,726,785.00	808,242,768	40%
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5,340,712,890.00	516,655,480	10%
8	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4,873,458,587.00	379,732,107	8%
9	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	59,504,292.00	16,320,500	27%

10	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,206,161,176.00	543,834,000	45%
11	Pembangunan Prasarana Pertanian	1,735,840,908.00	1,605,825,900	93%
12	Pengembangan Prasarana Pertanian	817,652,736.00	351,850,000	43%
13	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	201,451,747.00	8,970,000	4%
14	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	328,186,578.00	45,466,500	14%
15	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	198,481,408.00	59,319,168	30%
16	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	608,300,295.00	0	0%
17	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2,026,726,785.00	808,242,768	40%
18	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	352,602,640.00	169,079,100	48%
19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31,650,695,692.00	22,628,028,881	71%
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143,650,000.00	0	0%
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	967,146,038.00	338,830,658	35%

21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,250,359,472.00	2,036,487,043	90%
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583,620,000.00	544,110,727	93%

*Kab.Deli Serdang Tahun 2024*

Dari tabel 3.9 diatas dapat dijelaskan untuk realisasi tertinggi ada pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 90% dan 93 %. Untuk capaian realisasi pada program/kegiatan di atas tidak bias mencapai target karena adanya perubahan anggaran yang terjadi pada pertengahan tahun sehingga program/kegiatan yang ada tidak semua bias dikerjakan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS PERTANIAN Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERTANIAN Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS PERTANIAN Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERTANIAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS PERTANIAN tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS PERTANIAN memiliki 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja, dimana 2 indikator kinerja tercapai dan 2 indikator kinerja tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS PERTANIAN adalah :
  - Efisiensi anggaran;
  - Keterbatasan lahan penggembalaan sehingga mempengaruhi ketersediaan pakan ternak;
  - Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian lapangan, jumlah petugas pelayanan kesehatan hewan dan sarana prasarana puskesmas;
  - Berkurangnya lahan produktif pertanian akibat alih fungsi lahan;
  - Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana pertanian (banjir dan cuaca ekstrem).

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS PERTANIAN adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan secara rutin kepada petani untuk bias meningkatkan pengetahuan petani ;
2. Perlu dibuatnya Peraturan Daerah untuk mengatur tentang lahan pertanian potensial yang tidak boleh dialihfungsikan peruntukannya kepemukiman atausejenisnya ;

3. Mengarahkan para petani agar mereka bias masuk dalam kelompok tani agar mereka bias mendapat bantuan dari pemerintah seperti bantuan bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian ;
4. Perlu diperbanyaknya petani penangkar benih/bibit agar para petani semakin mudah mendapatkan bibit bersertifikat ;
5. Perlunya penambahan jumlah anggaran pemerintah di sector pertanian agar para petani kita bias mendapatkan bantuan pertanian secara merata.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERTANIAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERTANIAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holder* atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Lubuk Pakam, Februari 2024  
DINAS PERTANIAN  
Kab.Deli Serdang



**RAHMAN SALEH DONGORAN,SP,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680414 199103 1 016**

**LAMPIRAN**